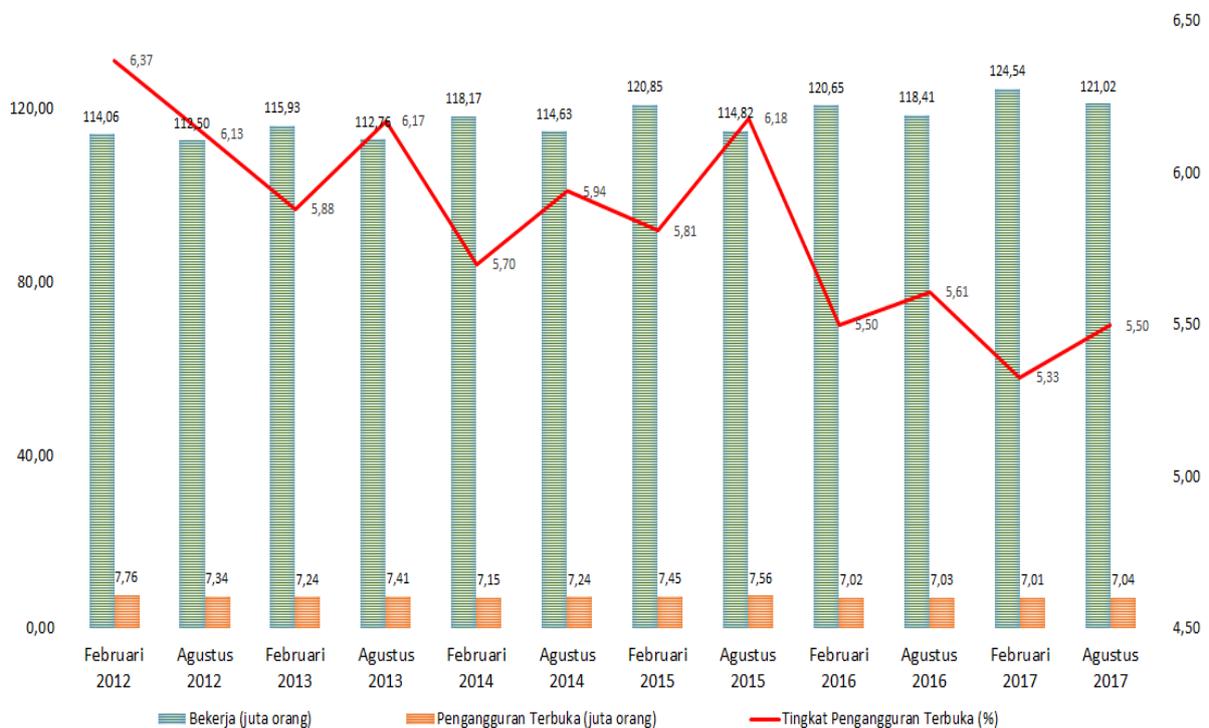


INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia seperti yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satu tujuannya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat menciptakan struktur masyarakat yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang layak, adil dan makmur. Ada beberapa Indikator Kesejahteraan antara lain:

A. Ketenagakerjaan

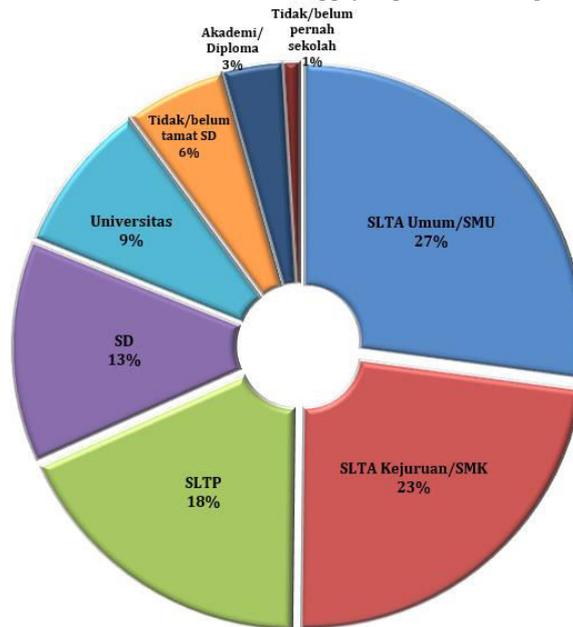
Gambar 1. Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Angkatan Kerja Tahun 2012-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Angka Pengangguran Terbuka bertambah 10 ribu orang dari 7,03 juta orang pada Agustus 2016 menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017. Namun dari presentase tingkat pengangguran terbuka menurun tipis 0,11 dari 5,61 persen pada Agustus 2016 menjadi 5,50 di Agustus 2017. Hal ini disebabkan kenaikan angkatan kerja tidak mampu diserap oleh industri.

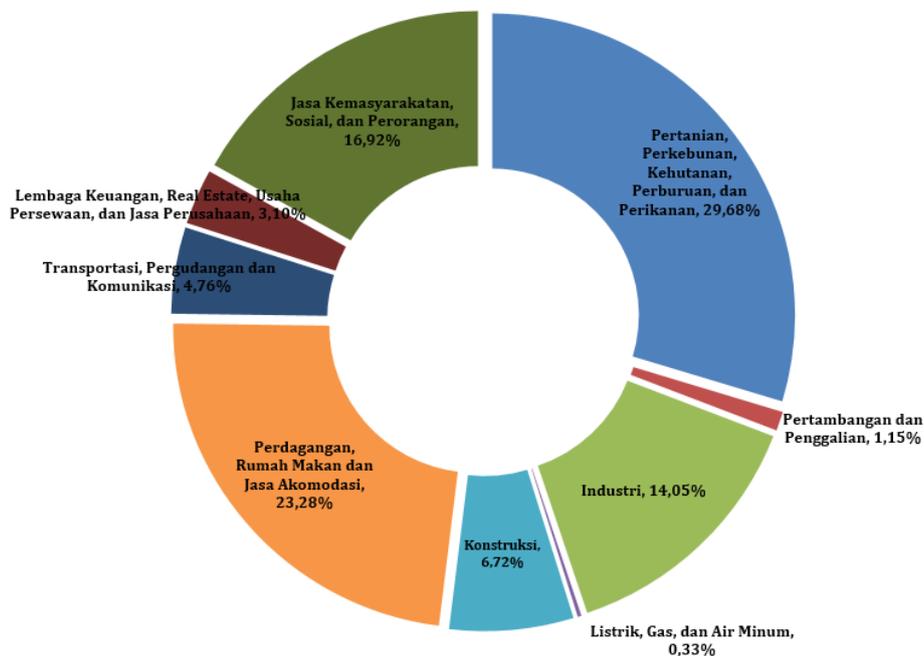
Gambar 2. Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan per Agustus Tahun 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, Pengangguran Terbuka terbanyak berada pada tingkat SLTA Umum/SMU (27 persen) dan SLTA Kejuruan/SMK (23 persen). Hal ini menandakan ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat SMU dan SMK.

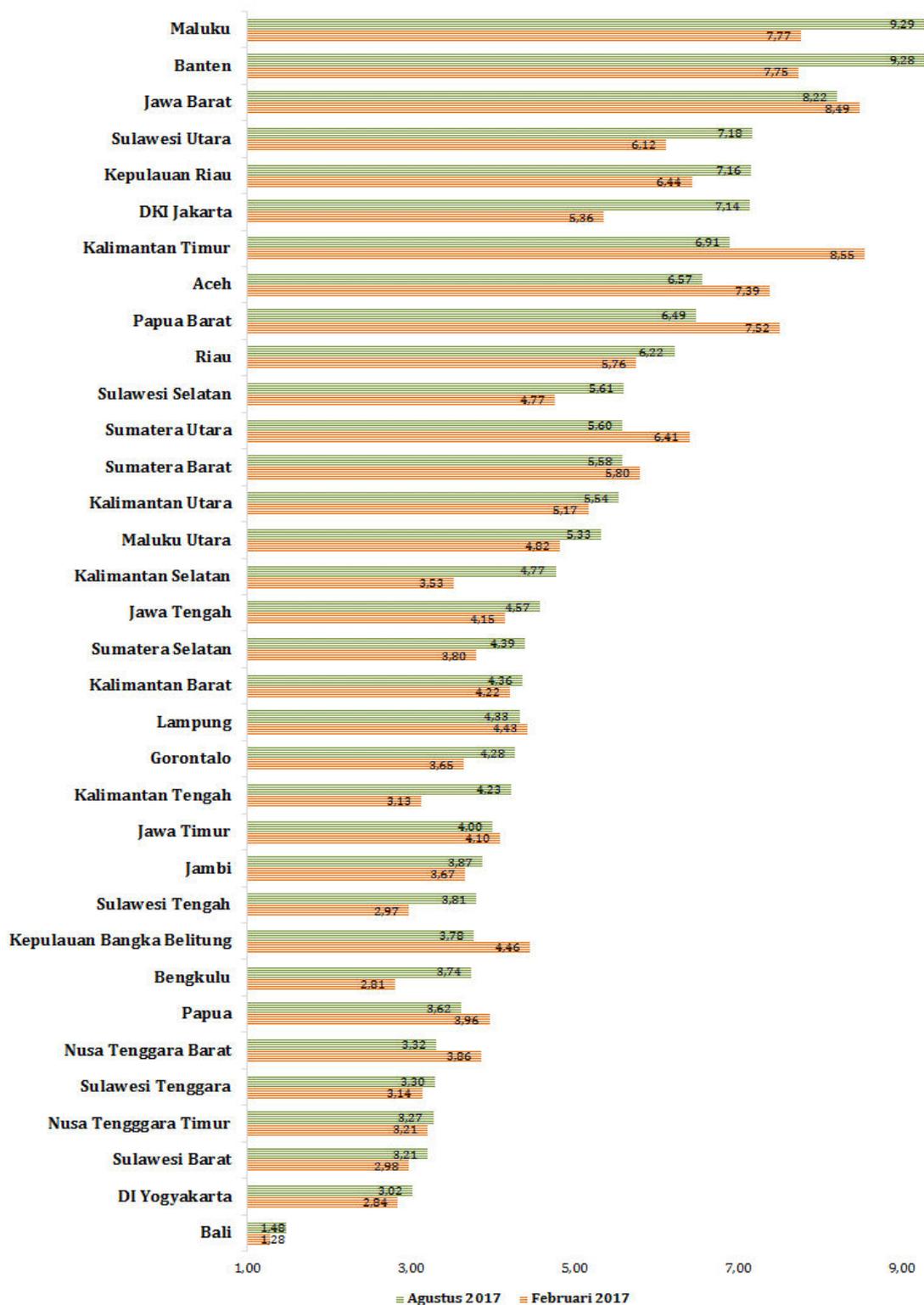
Gambar 3. Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Per Agustus Tahun 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja terbanyak berada pada sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan (29,68 persen) dan Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi (23,28 persen).

Gambar 4. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Tahun 2017

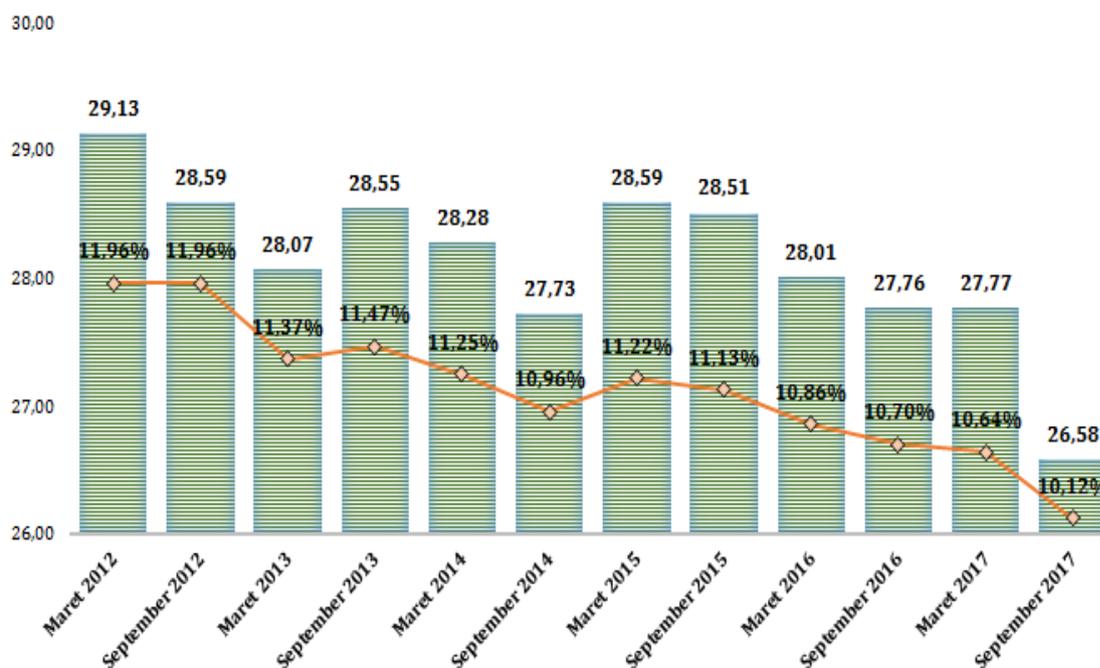


Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi pada Agustus 2017 berada di Provinsi Maluku (9,29 persen) dan Provinsi Banten (9,28 persen).

B. KEMISKINAN

Gambar 5. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) Dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) pada September 2017 berkurang 1,19 juta orang dibandingkan pada Maret 2017

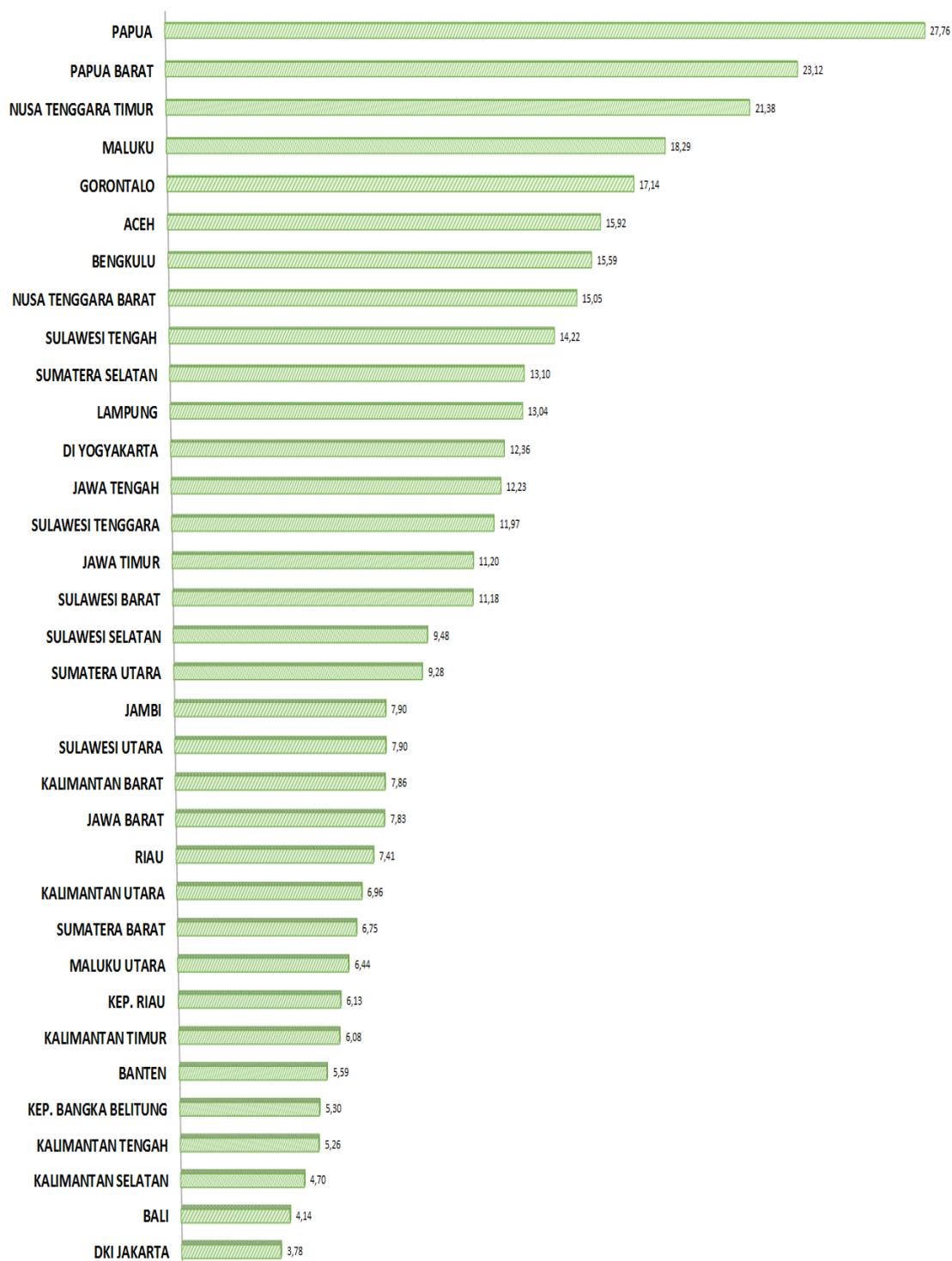
Gambar 6. Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2015-2017

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Presentase Penduduk Miskin	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin	Perubahan Presentase Penduduk Miskin
Perkotaan				
September 2015	10,62	8,22		
September 2016	10,49	7,73	-0,13	-0,49
September 2017	10,27	7,26	-0,21	-0,47
Perdesaan				
September 2015	17,89	14,09		
September 2016	17,28	13,96	-0,62	-0,13
September 2017	16,31	13,47	-0,97	-0,49

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dari di perkotaan. Pada periode 2016-2017 terjadi penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dari perkotaan.

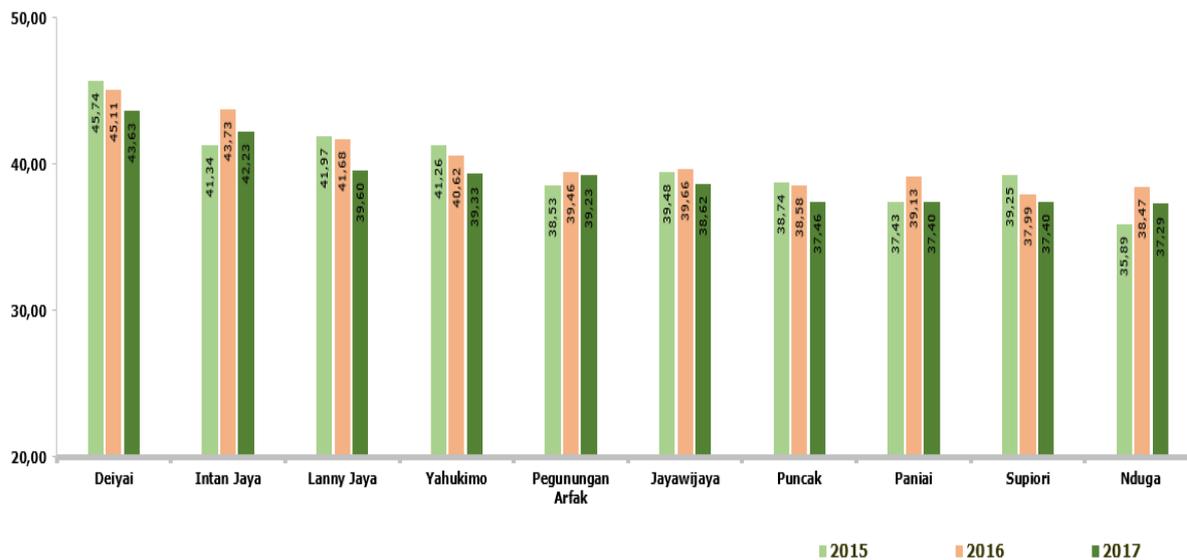
Gambar 7. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Per September 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Persentase penduduk miskin terbesar masih berada di Provinsi Papua (27,76 persen), Papua Barat (23,12 persen) dan Nusa Tenggara Timur (21,38 persen).

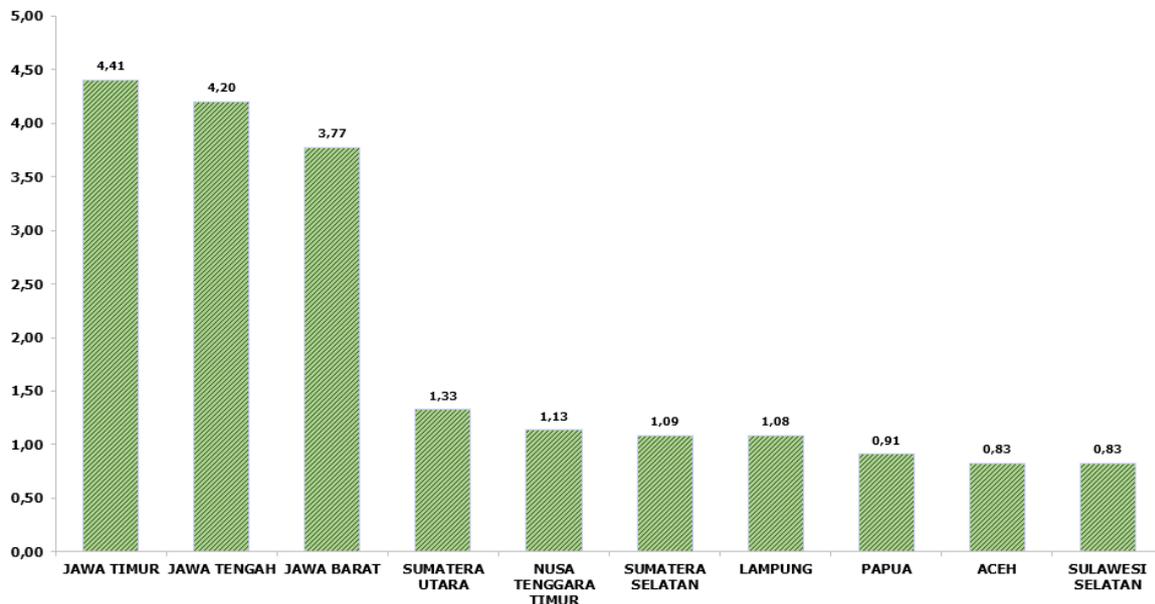
Gambar 8. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Persentase penduduk miskin terbesar menurut kabupaten/kota di Indonesia berada di Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua.

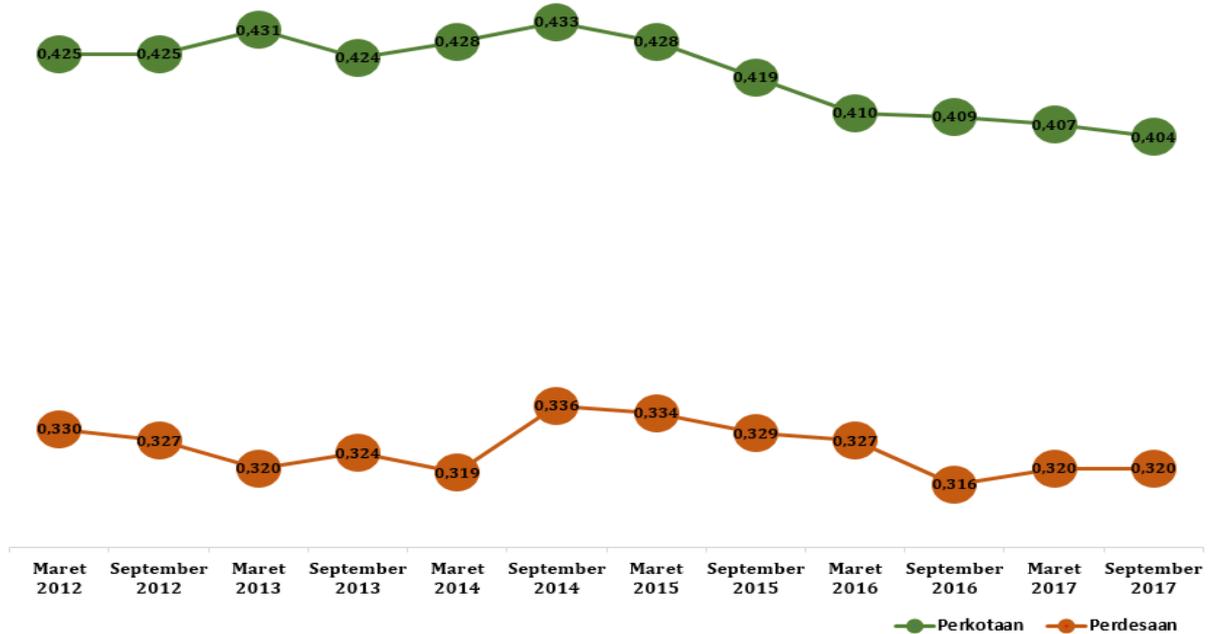
Gambar 9. Penduduk Miskin Menurut Provinsi per September 2017 (Juta Orang)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Sedangkan dari sisi jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur (4,41 juta orang) dan Jawa Tengah (4,20 juta orang).

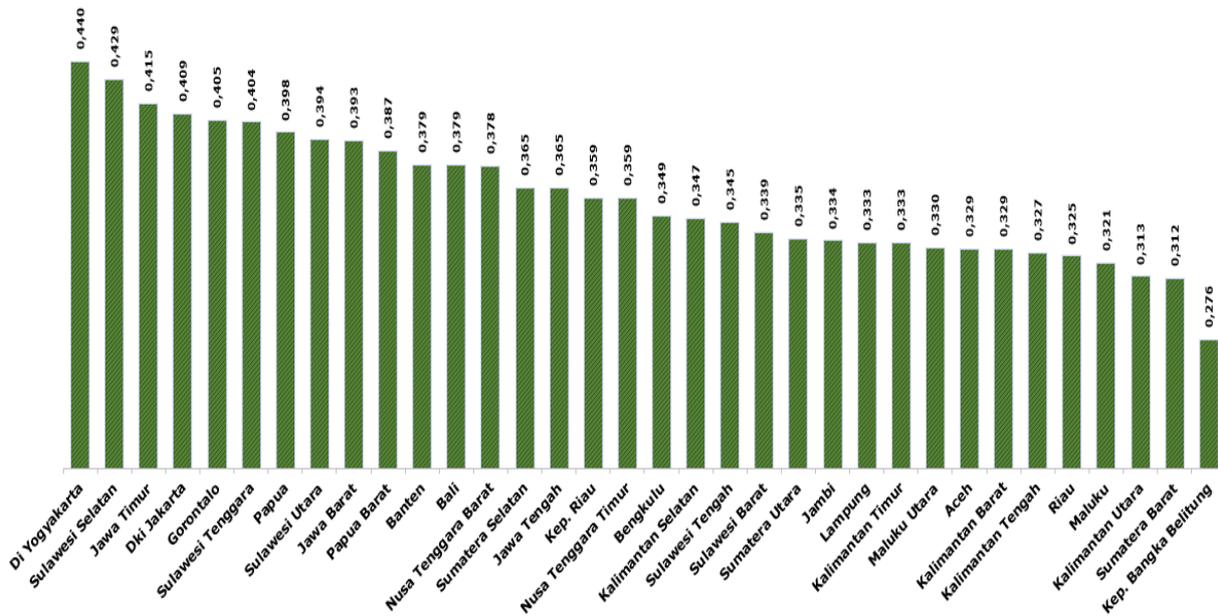
Gambar 10. Tren Rasio Gini Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2012-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Rasio gini perkotaan pada September 2017 turun sebesar 0,003 poin jika dibandingkan pada Maret 2017. Rasio gini perdesaan pada September 2017 sama jika dibandingkan pada Maret 2017. Rasio gini di perkotaan jauh lebih tinggi dibanding perdesaan.

Gambar 11. Rasio Gini Provinsi Per September 2017

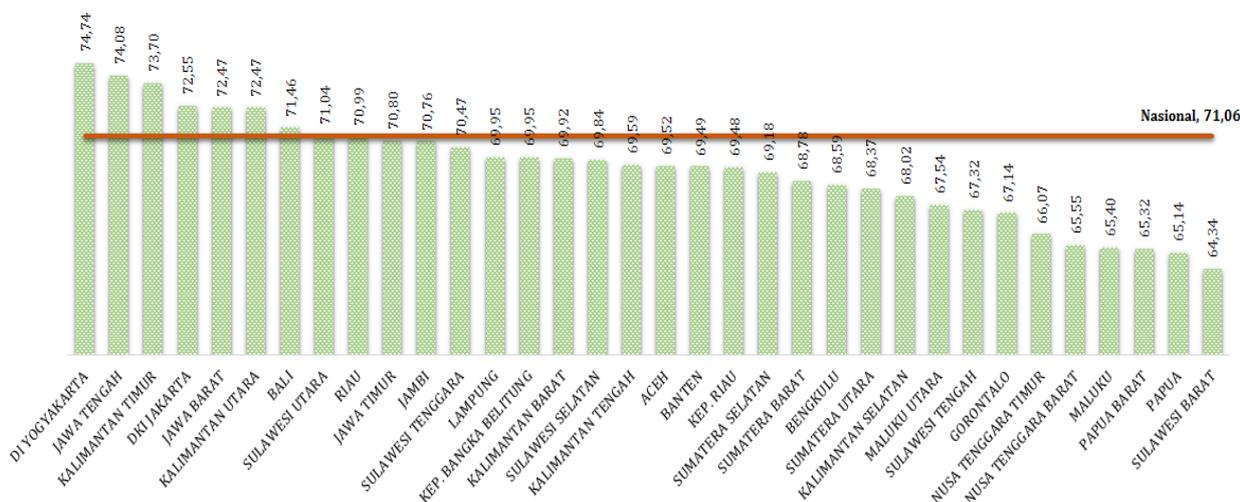


Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Rasio Gini tertinggi berada di Provinsi DI Yogyakarta (0,440) dan terendah berada di Provinsi Kep. Bangka Belitung (0,276).

C. Kesehatan

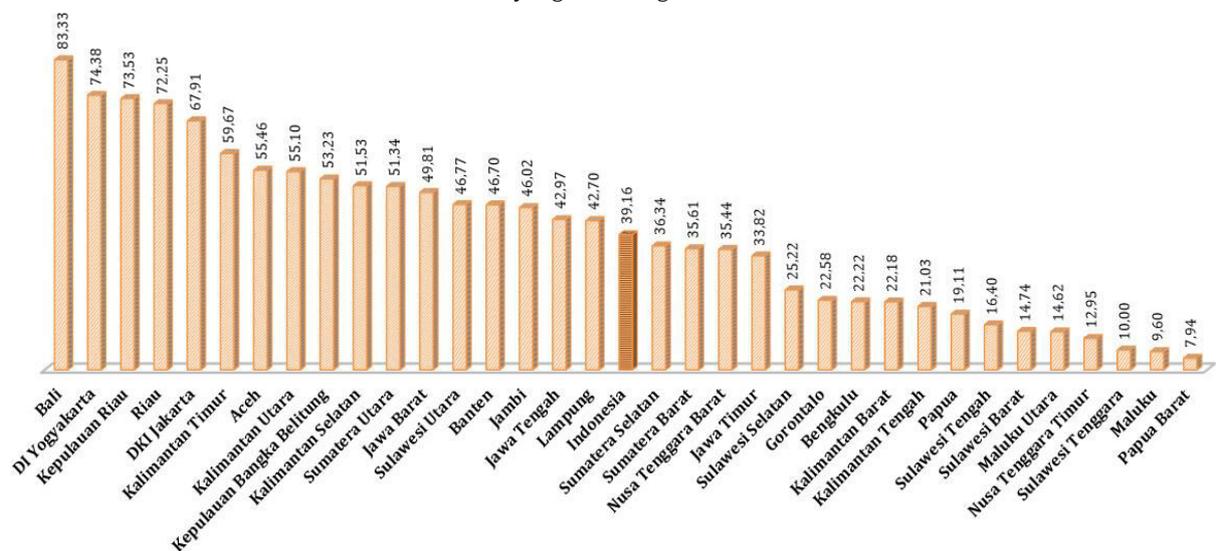
Gambar 12. Angka Harapan Hidup Saat Lahir Menurut Provinsi Tahun 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Dari seluruh Provinsi hanya terdapat tujuh Provinsi dengan Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir di atas angka nasional (71,06). Sulawesi Barat tercatat merupakan Provinsi dengan AHH terendah yang lebih rendah 10 tahun dibandingkan capaian AHH di DI Yogyakarta. Dengan kata lain, rata-rata bayi baru lahir di Sulawesi Barat akan hidup 10 tahun lebih pendek dibandingkan bayi yang lahir di DI Yogyakarta.

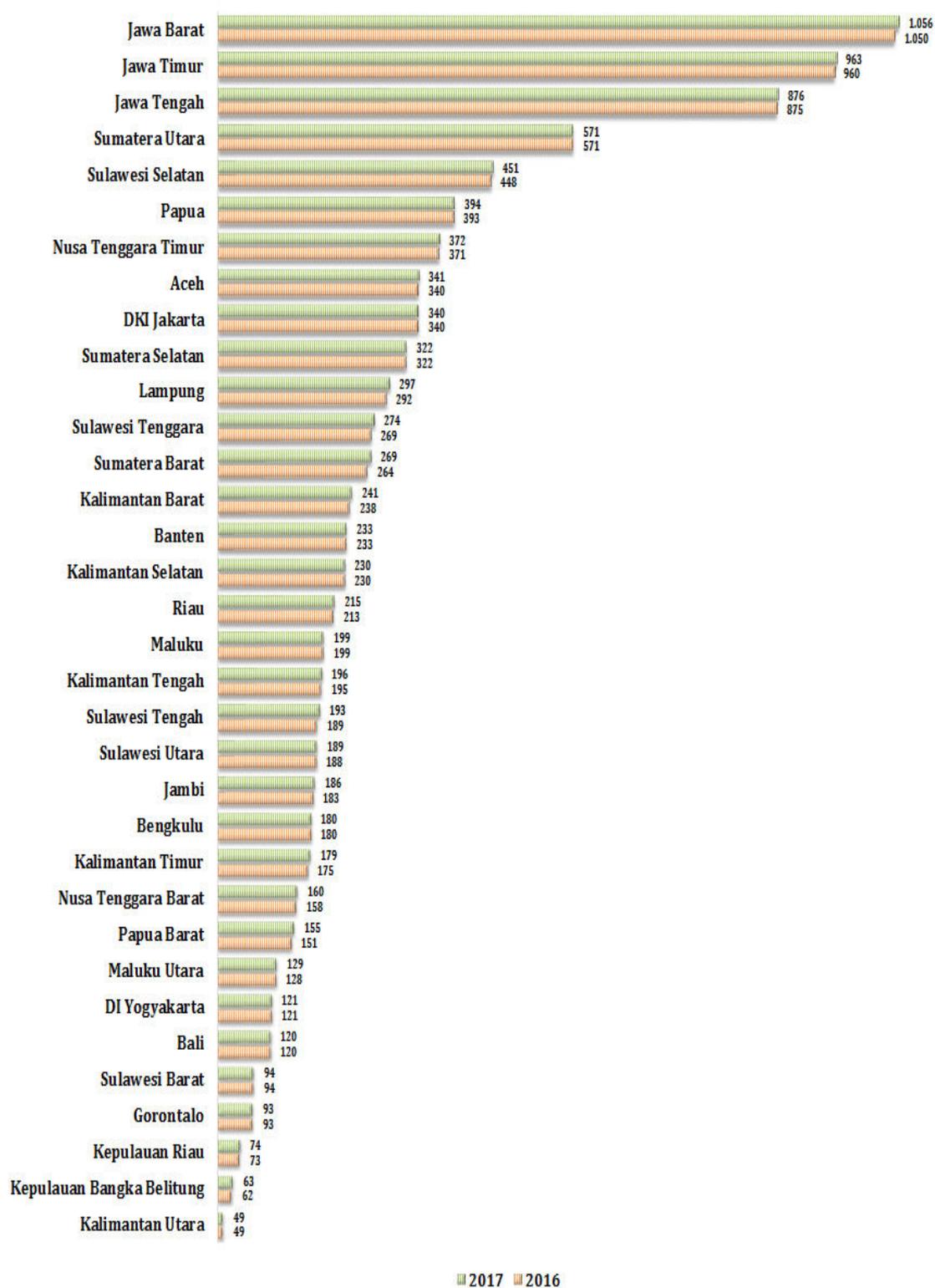
Gambar 13. Presentase Puskesmas yang Kekurangan Dokter Menurut Provinsi Tahun 2017



Sumber : Profil Kesehatan Indonesia 2017, Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, diolah

Pada tahun 2017, Puskesmas di Indonesia yang kekurangan dokter ada sebanyak 39,16 persen. Presentase tertinggi untuk Puskesmas yang kekurangan dokter terdapat di Bali (83,33 persen) dan terendah terdapat di Papua Barat (7,94 persen).

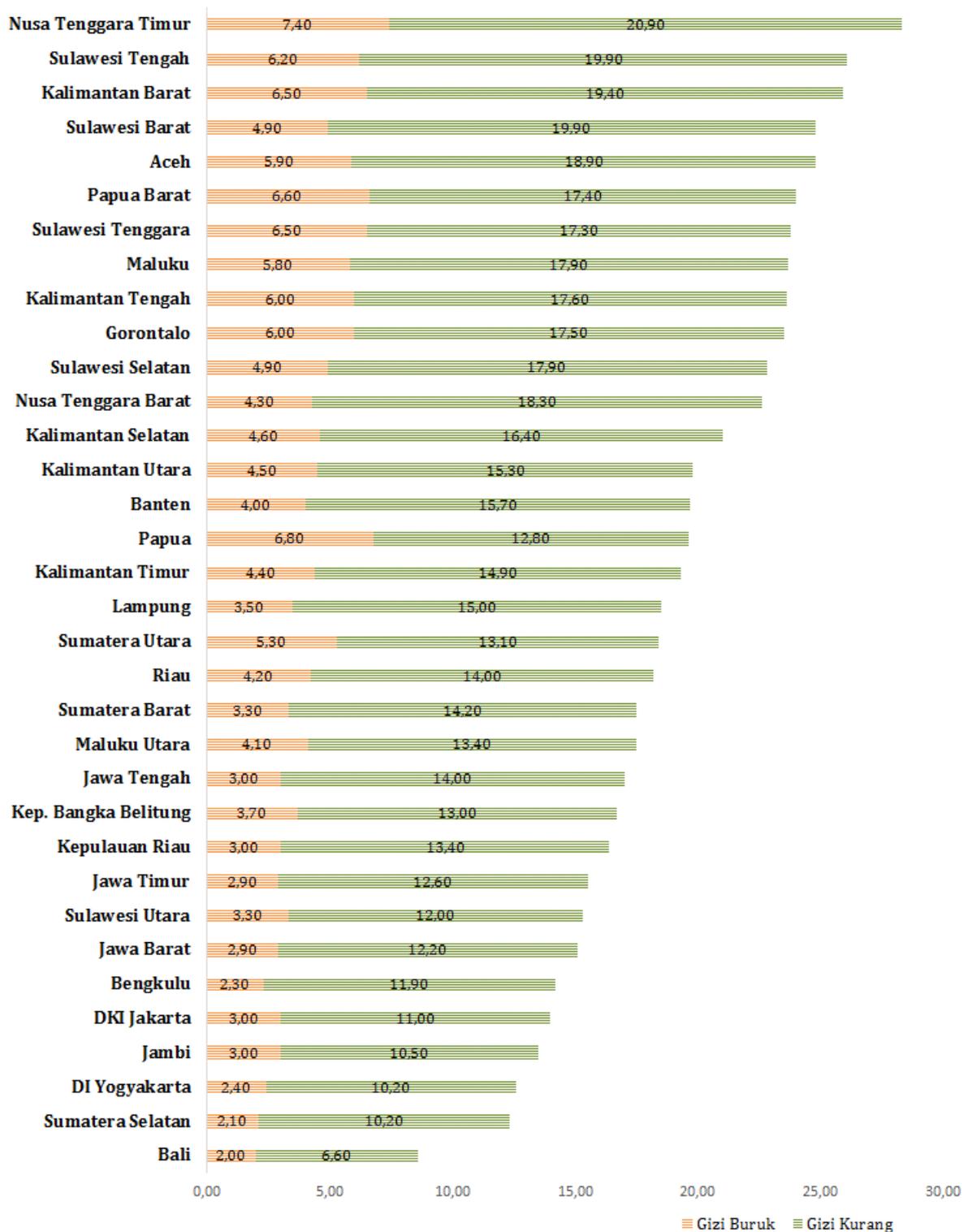
Gambar 14. Jumlah Puskesmas Menurut Provinsi Tahun 2016-2017 (unit)



Sumber : Profil Kesehatan Indonesia 2017, Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, diolah

Rata-rata di setiap Provinsi terjadi peningkatan jumlah fasilitas sarana kesehatan Puskesmas dari tahun 2016-2017.

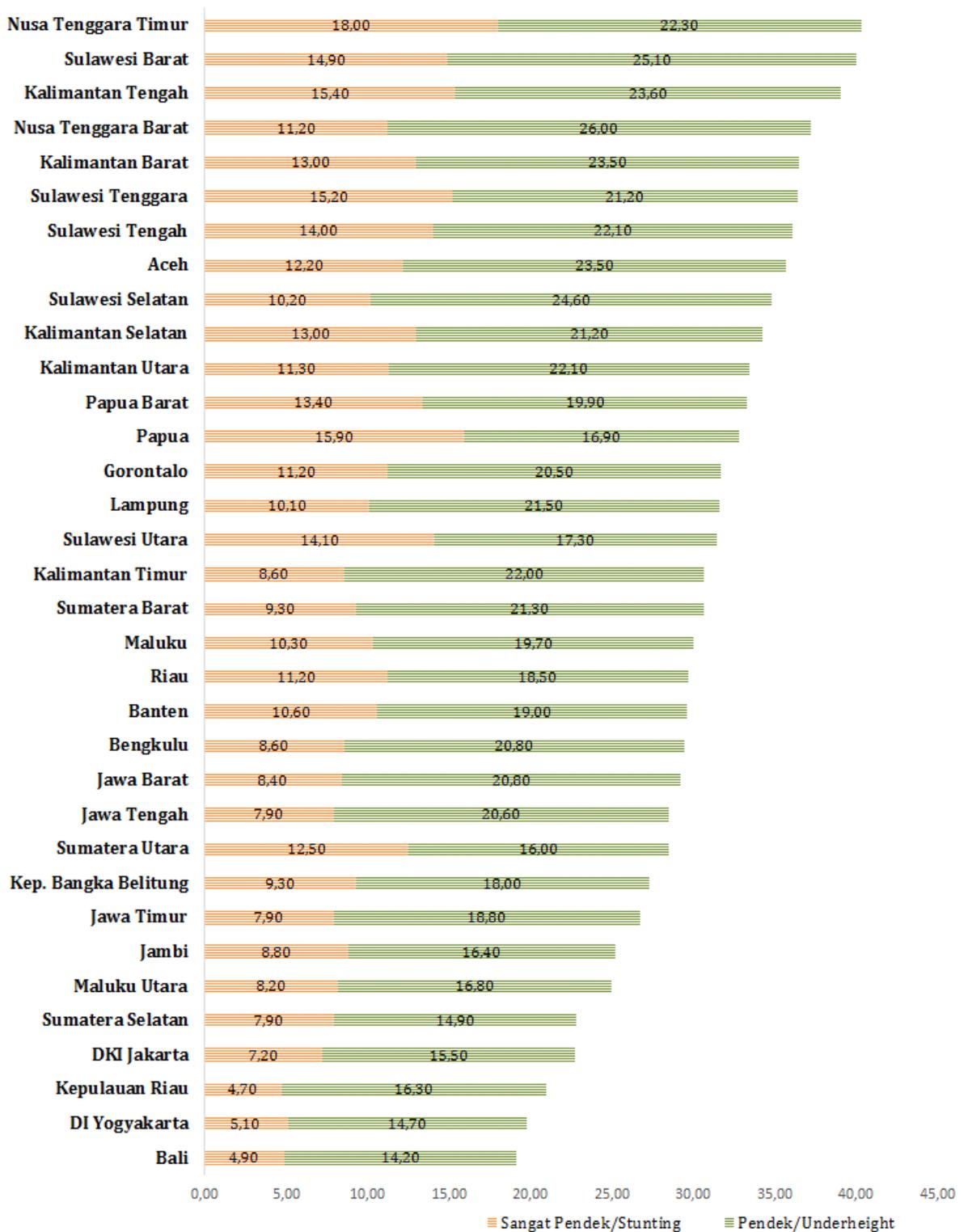
Gambar 15. Presentase Balita Usia 0-59 Bulan Menurut Status Gizi dengan Indeks BB/U Menurut Provinsi Tahun 2017



Sumber : Profil Kesehatan Indonesia 2017, Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, diolah

Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, prevalensi *underweight* sebesar 28,3 persen, dimana 7,40 persen balita menderita gizi buruk dan 20,90 persen balita menderita gizi kurang.

Gambar 16. Presentase Balita Usia 0-59 Bulan Menurut Status Gizi dengan Indeks TB/U Menurut Provinsi Tahun 2017

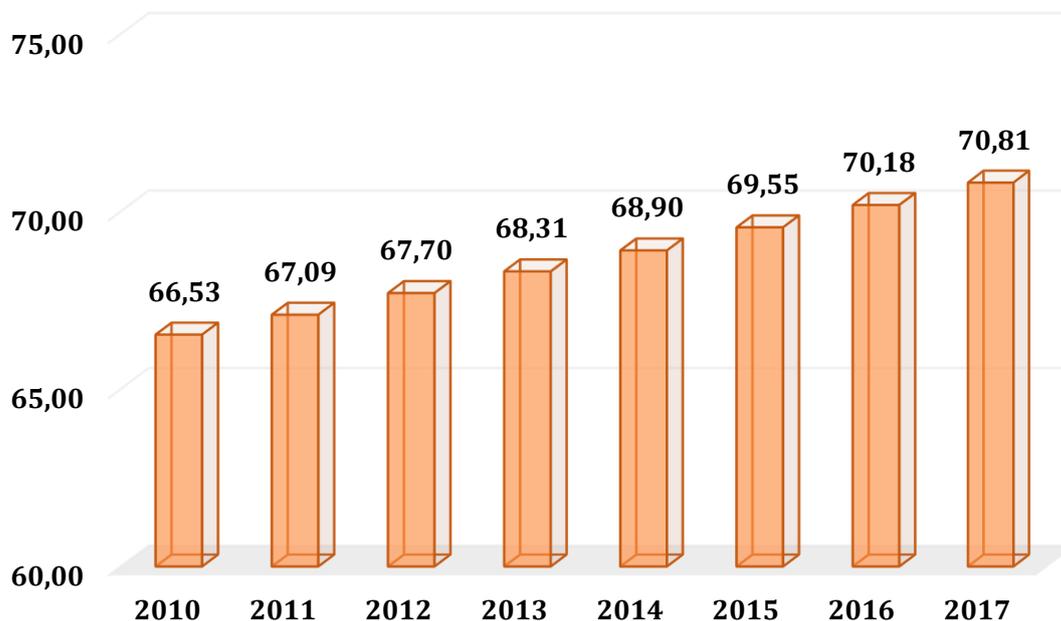


Sumber : Profil Kesehatan Indonesia 2017, Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, diolah

Provinsi dengan persentase tertinggi balita *stunting* yaitu Nusa Tenggara Timur sebesar 40,3 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sekitar 4 dari 10 balita di Provinsi ini adalah balita pendek.

D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

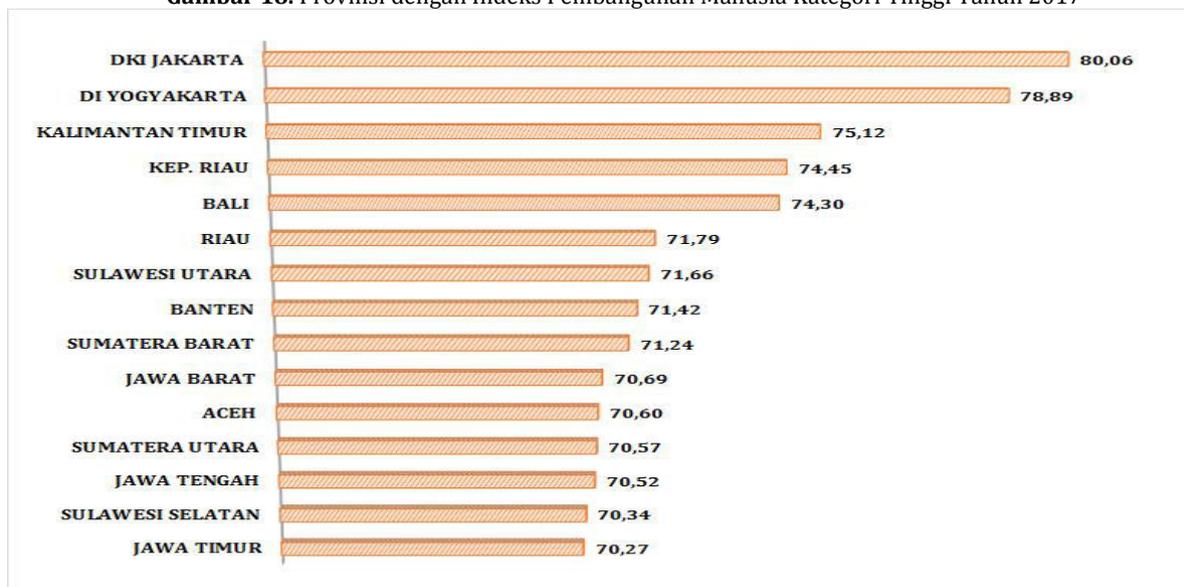
Gambar 17. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010-2017
(Metode Baru)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

IPM Indonesia tercatat mengalami kenaikan dari tahun 2010-2017 dari sedang menjadi tinggi. IPM Indonesia tahun 2017 masuk kategori tinggi yaitu diatas 70.

Gambar 18. Provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia Kategori Tinggi Tahun 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 15 provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia kategori tinggi (diatas 70).